

---

## INOVASI PEMERINTAH DAERAH: SIMPERDA SEBAGAI WUJUD *SMART CITY* DI KOTA SEMARANG

Yuni Kurniasih<sup>1</sup>, Joko Tri Nugroho<sup>2</sup>

### Abstrak

Era globalisasi dan digital pada saat ini menuntut kepada sebuah pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Keterbukaan informasi menjadi kebutuhan masyarakat. Inovasi harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan di era tersebut. Inovasi tersebut berkaitan dengan perencanaan pembangunan berbasis teknologi. Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik. Salah satu pemerintah daerah yang berinovasi melakukan hal tersebut adalah Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang membuat sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi yang diberi nama SIMPERDA (Sistem Perencanaan Daerah). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur melalui data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui pelaksanaan penerapan Smart city dalam SIMPERDA dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada untuk mewujudkan bahwa Pemerintah Kota Semarang bisa menjadi salah satu daerah yang telah menjalankan salah satu syarat agar menjadi Good Governance. Aplikasi Simperda yang berbasis teknologi ini diharapkan dapat menuntut pelaku perencanaan agar dapat sesuai dengan tata kelola mekanisme alur kinerja. Setiap rangkaian perencanaan dari tingkatan kecamatan sampai dengan kabupaten dilakukan secara terintegrasi. Seluruh proses dalam setiap rangkaian perencanaan dilakukan secara online melalui Simperda ini.

Kata Kunci: **Inovasi, *Smart City*, Simperda**

### Abstract

*The current era of globalization and digital demands a fast, precise, and accurate information service. Information disclosure is a public need. The government must carry out innovation to meet the needs of that era. The innovation is related to technology-based development planning. Smart City is applying the concept of a smart city by utilizing technology to realize good public services. One of the local governments that innovate is the Semarang City Government. The Semarang City Government created a technology-based development planning system called SIMPERDA (Regional Planning System). The method used in this research is literature study through secondary data. This research aims to find out the implementation of Smart city implementa-*

---

<sup>1</sup> Universitas Tidar, Magelang - Jawa Tengah

<sup>2</sup> Universitas Tidar, Magelang - Jawa Tengah

---

*tion in SIMPERDA by utilizing existing information and communication technology to realize that the Semarang City Government can become one of the regions that have implemented one of the requirements to become Good Governance. With the existence of a technology-based Simperda, it is hoped that planning actors will be able to comply with the governance of the performance flow mechanism. Every series of planning from the sub-district to the district level is carried out in an integrated manner. The entire process in each planning series is carried out online through Simperda.*

*Keywords: Innovation, Smart City, Simperda*

## **PENDAHULUAN**

Teknologi merupakan salah satu bentuk dari perkembangan jaman. Bahkan pada abad ini, penggunaan teknologi semakin meluas di seluruh dunia dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web atau yang akrab disebut dengan internet. Kehadiran teknologi internet di tengah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan akan informasi dengan sangat cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, hal-hal yang dahulu dikerjakan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama, kini dengan bantuan teknologi internet dan sistem komputerisasi yang canggih menjadikan pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sistem *on-line* atau daringpun (dalam jaringan) semakin populer, termasuk di Indonesia.

Pada bidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi internet dikenal dengan sebutan *electronic government* atau *e-government*. Perkembangan E-Government di negara kita sudah mulai sejak sekitar 4 tahun yang lalu, dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah karena salah satu pertimbangannya adalah pemanfaatan ICT dalam proses pemerintahan, akan mampu meningkatkan efektifitas, efisiensi, kejelasan (transparansi), dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Apabila hal tersebut terjadi, maka timbul harapan baru, dimana dengan adanya pemerintahan berbasis elektronik diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan (*service*) kepada publik secara lebih baik. Hal

---

itu tentunya akan mendorong terciptanya good government (ketata pemerintahan yang baik) yang mampu menjalankan roda pemerintahan yang bertanggung jawab. Salah satu aspek utama dari *E-Government* adalah bagaimana *E-Government* ini membawa masyarakat dan para pelaku bisnis menjadi lebih dekat dengan pemerintah. Hal ini terjadi karena pada implementasinya, *E-Government* dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk menyediakan akses yang bisa dipercaya bagi masyarakat dan pelaku bisnis akan informasi dari pemerintah, memberikan pelayanan yang lebih baik bagi dan menyediakan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses yang demokratis pada pemerintah. Begitu pula sebaliknya, para pelaku bisnis dan masyarakat juga dituntut untuk dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dan berperan aktif dalam mensukseskan program kerja pemerintah.

Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku bisnis ini tentunya bisa memberikan manfaat yang besar bagi daerah, yaitu terciptanya *economic development*. Terkait dengan *economic development*, kita bisa melihat masa lalu di mana aktivitas ekonomi masih bertumpu pada hal yang bersifat konvensional, maka fokus dari pembangunan ekonomi ditujukan hanya pada sedikit perusahaan besar dengan cara memberikan modal dan kemudahan. Sedangkan di era ekonomi berbasis teknologi informasi, maka pembangunan ekonomi lebih difokuskan pada pelaku ekonomi berskala kecil yang mampu bekerja secara efisien

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan *E-Government* di dalam menjalankan urusan pemerintahannya guna mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal ini sejalan dengan misi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu Penguatan *Good Governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin handal terdapat dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025.

Dalam melakukan perencanaan daerah, Pemerintah Kota Semarang membuat suatu sistem perencanaan daerah berbasis teknologi informasi yang disebut sebagai SIMPERDA. SIMPERDA ini merupakan salah satu inovasi

---

pemerintah Kota Semarang untuk mengimplementasikan wujud dari Penguatan *Good Governance* tersebut. *SIMPERDA* ini merupakan suatu sistem perencanaan menggunakan media *E-Government* untuk melakukan perencanaan daerah yang diharapkan dapat menciptakan *Good Governance* di Kota Semarang. Hal ini juga sebagai wujud dari *Smart City* yang di terapkan dalam kinerja pemerintah Kota Semarang. *SIMPERDA* digunakan sebagai media untuk meningkatkan perencanaan daerah terpadu dalam pembangunan yang terintegrasi di Kota Semarang untuk mewujudkan *Good Governance*.

*SIMPERDA* termasuk dalam salah satu inovasi pemerintah Kota Semarang. Penulis tertarik mengenai pelaksanaan program *smart city* dalam *Simperda* tersebut di masyarakat Kota Semarang dan perbedaan dari hasil perencanaan daerah di Kota Semarang sebelum dan sesudah menggunakan *SIMPERDA*. Diharapkan *SIMPERDA* mampu menjawab masalah dan tantangan perencanaan daerah pada umumnya seperti belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah; belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah; belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan; rendahnya kapasitas sumber daya perencana perencanaan pembangunan; dan rendahnya inovasi daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan mempelajari berbagai buku literatur dan dokumen- dokumen terkait dengan *smart city* dan *Simperda*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (*SIMPERDA*) pada dasarnya merupakan sistem yang dapat digunakan untuk

---

melakukan suatu perencanaan yang terpadu dan terencana. Ruang lingkup rencana pengembangan nantinya diharapkan setiap SKPD di Kota Semarang dapat menerapkan sistem ini mengingat proses perencanaan pembangunan berawal dari program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun oleh masing-masing SKPD.

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) adalah sistem yang dibuat dan dikemas seiring dengan kemajuan teknologi informasi, guna memperoleh percepatan proses perencanaan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan, dari pencatatan, pengolahan dan penyusunan laporan, maka harus didukung dengan tersedianya sarana prasarana *hi-tech* di bidang sistem informatika perencanaan pembangunan, yang berbasis pada perangkat keras dan perangkat lunak dari teknologi komputer. Dengan perekayasa teknologi informasi, akan mampu membuat pengelolaan data dan informasi menjadi lebih mudah, efisien, fleksibel dan menarik, yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang cepat dan akurat guna penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan.

Melalui kecanggihan teknologi sekarang ini, pemerintah berlomba-lomba membuat inovasi baru yang smart dengan tujuan untuk mewujudkan kota yang lebih cerdas, dimana mampu melayani dan menciptakan kota yang nyaman untuk hidup bagi warganya. Kota yang cerdas ini lebih dikenal dengan istilah *smart city*.

Kota Semarang telah berkembang cukup pesat beberapa tahun terakhir. Guna mencapai visi dan misinya, pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam melakukan pembangunan. Pemerintah Kota Semarang merupakan salah satu dari 25 kabupaten/kota di Indonesia yang memperoleh program pendampingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun 2017 melalui Gerakan Menuju 100 *Smart City*.

Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas unsur pemerintahan daerah dan DPRD. Dalam siklus perencanaan, Kota Semarang melakukan dari tingkatan RW, Musrenbang Kelurahan, Forum SKPD, Rumpun SKPD,

---

serta Musrenbang Kota. Pelibatan aktif DPRD dalam siklus perencanaan ini bertujuan agar pokok pikiran dewan sudah diwadahi sejak awal perencanaan. Hal ini didorong oleh Bappeda Kota Semarang agar kedua belah pihak saling bekerja sama dengan baik dan efisien.

Dalam proses perencanaan Kota Semarang telah menerapkan sistem *E-Government*. Salah satu pengembangan *E-Government* yang sedang dibangun adalah mengenai Sistem Informasi Manajemen (SIM). Salah satunya ialah *Simperda*. *Simperda* ialah sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang dilembangkan di bawah naungan Bappeda.

Penerapan *SIMPERDA* ini adalah suatu bentuk Inovasi Pemerintah Kota Semarang dalam perencanaan daerah berbasis teknologi Informasi berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. *SIMPERDA* termasuk inovasi daerah dalam bentuk tata kelola Pemerintahan Daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal.

Konsep interaksi antar pelaku dalam *SIMPERDA* ini adalah mengadopsi konsep *Government to Employees (G to E)* yaitu hubungan antara pemerintah dengan pegawai. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan. Dalam hal ini hubungan yang di maksud adalah hubungan antara BAPPEDA sebagai pengembang dan administrator dengan Beberapa OPD, *Stakeholders*, DPRD, Kecamatan dan Kelurahan sebagai operator/user dalam proses pembuatan dokumen perencanaan pembangunan yang bermuara pada RKPD Kota Semarang.

Perkembangan sistem adanya *Simperda* ini adalah sebagai bentuk perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya *Simperda* yang berbasis teknologi ini diharapkan dapat menuntut pelaku perencanaan agar dapat sesuai dengan tata kelola mekanisme alur kinerja.

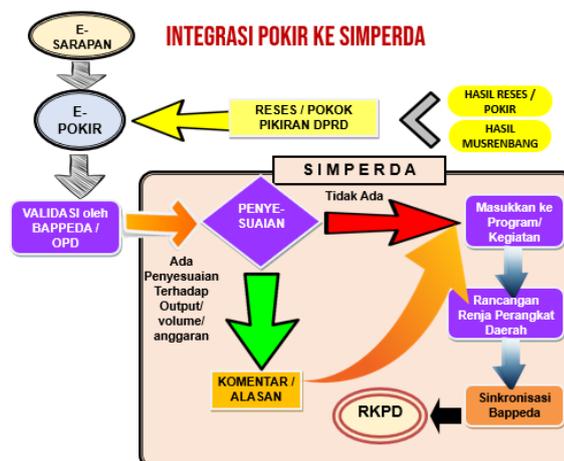
Melalui sistem ini, setiap rangkaian perencanaan dari tingkatan kecamatan sampai dengan kabupaten dilakukan secara terintegrasi. *Simperda* dimulai dari mekanisme musrenbang RT RW, kemudian kelurahan, dan



indikator-indikator RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

| Kode   | Kegiatan  | Anggaran & Sumber Dana | Dedikasi | Target Output | Tambah Output | Hasil Output | Anggaran | Masukan | Hasil | Catatan | TRAIL |
|--|---|------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|---------|-------|---------|-------|
| 1.1.04.01 - DINAS PERUBAHAN DAN KORBUSAN PERKUMHUMAN               |   |                        |          |               |               |              |          |         |       |         |       |
| 1.1.04 - URUSAN PERUBAHAN BAKTUK DAN KORBUSAN PERKUMHUMAN          |   |                        |          |               |               |              |          |         |       |         |       |
| 1.1.04.1.1.04.01.01 - PROGRAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |   |                        |          |               |               |              |          |         |       |         |       |
| 1.1.04.1.1.04.01.01.001  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 11.000.000             |          |               |               |              |          |         |       |         | 0     |
| 1.1.04.1.1.04.01.01.002  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                   | 1.454.000.000          |          |               |               |              |          |         |       |         |       |
| 1.1.04.1.1.04.01.01.006  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Peluncuran Kendaraan Dinas / Operasional | 550.777.000            |          |               |               |              |          |         |       |         |       |

Gambar 3 Tahapan Verifikasi



Gambar 3 Tahapan Integrasi POKIR

Tahapan terakhir adalah Tahapan Integrasi POKIR dengan SIMPERDA ini adalah suatu proses integrasi dari aplikasi E-POKIR dengan aplikasi SIMPERDA.

*Simperda* yang dibangun di Kota Semarang guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, serta sebagai upaya menuju *Good Governance* seperti yang diharapkan. *Simperda* terintegrasi dengan *Simkeuda* (Sistem Informasi Manajemen Keudangan Daerah) yang berada di bawah DPKAD. Disinilah transparansi anggaran terbentuk.

Selain itu, pada tahun 2015, *Simperda* dan *Simkeuda* akan diintegrasikan kembali dengan *SimBpp* (Sistem Informasi Manajemen Bendahara Pembantu) dan *Simmonev* (Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi) sehingga sewaktu-waktu bisa dilaksanakan monitoring maupun evaluasi mengenai penyelenggaraan pembangunan Kota

---

Semarang dan membantu dalam mengambil kebijakan. Di bawah koordinasi Bappeda, *Simmove* juga terdapat menu kesesuaian antar dokumen perencanaan sehingga bisa menjadi kontrol bagi SKPD.

Penerapan SIMPERDA sejak awal diterapkan Hingga Sekarang yang membahas tahapan perkembangan atau perubahan masa yang terbagi menjadi 3 kondisi yaitu Kondisi pada Proses awal penerapan SIMPERDA ini masih berbasis *Offline* dan usulan program dan kegiatannya belum secara otomatis tersinkronisasi dengan indikator dari RPJMD Kota Semarang dan RENSTRA OPD. Kondisi sistem SIMPERDA pada Masa Transisi berkaitan dengan kondisi di mana perbaikan sistem SIMPERDA dari berbasis *Offline* menjadi *Online*, user/operator OPD diberi kewenangan oleh BAPPEDA untuk dapat mengakses sistem SIMPERDA melalui sistem Username dan password dan usulan program dan kegiatannya sudah secara otomatis tersinkronisasi dengan indikator dari RPJMD Kota Semarang dan RENSTRAOPD. Kondisi sistem SIMPERDA pada pasca transisi berkaitan dengan perluasan akses data oleh User/operator yang awalnya hanya dapat diakses oleh User/operator OPD, pada masa ini User/Operator Kecamatan dan Kelurahan dapat mengakses sistem SIMPERDA. Dengan adanya SIMPERDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Semarang ini terlihat cukup signifikan kenaikan usulan program/kegiatan yang Terakomodir, dan adanya peningkatan Alokasi Fasilitas MUSRENBANG Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2017-2018.

## **KESIMPULAN**

Penerapan *SIMPERDA* ini adalah suatu bentuk Inovasi Pemerintah Kota Semarang dalam perencanaan daerah berbasis teknologi Informasi berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. *SIMPERDA* termasuk inovasi daerah dalam bentuk tata kelola Pemerintahan Daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya *Simperda* yang berbasis teknologi ini

---

diharapkan dapat menuntut pelaku perencanaan agar dapat sesuai dengan tata kelola mekanisme alur kinerja. Setiap rangkaian perencanaan dari tingkatan kecamatan sampai dengan kabupaten dilakukan secara terintegrasi. Seluruh proses dalam setiap rangkaian perencanaan dilakukan secara *online* melalui Simperda ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman. 2019. *Smart City*, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. Universitas Islam Sumatera Utara].
- Bunyamin. Pengembangan Kota Cerdas Di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang .
- Insani, Priskadini April. 2017. Mewujudkan Kota Responsif melalui Smart City. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 2, Nomor 1.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2015. *KPPOD Brief Membangun Indonesia dari Daerah*. Jakarta Selatan.
- Muchlas M. Tahir. 2015. Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card Di Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mursalim, Siti Widharetno. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume 14, Nomor 1.
- Reitania Dwi Novia Nainggolan. Inovasi Pemerintah Daerah dalam Sistem Perencanaan Berbasis Teknologi Informasi untuk mewujudkan Good Governance di Kota Semarang.
- Suyono, Yoyok Yudistira. 2016. *Bandung Smart City (Peran Teknologi-September 2016)*. Jakarta : Siemens Indonesia
- Winda Oktaviyani1, Joko Tri Nugraha. 2018. Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program *Smart City* Di Kota Magelang (Studi Kasus Bappeda Kota Magelang). Universitas Tidar Magelang